IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Kabupaten Lampung Selatan

Kabupaten Lampung Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kalianda. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.109,74 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 923.002 jiwa (LSDA 2007).

Kabupaten Lampung Selatan bagian selatan meruncing dan mempunyai sebuah teluk besar yaitu Teluk Lampung. Di Teluk Lampung terdapat sebuah pelabuhan yaitu Pelabuhan Panjang dimana kapal-kapal dalam dan luar negeri dapat merapat. Secara umum pelabuhan ini merupakan faktor yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi penduduk Lampung, terutama penduduk Lampung Selatan. Pelabuhan ini sejak tahun 1982 termasuk dalam wilayah Kota Bandar Lampung.

Di bagian selatan wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang juga ujung Pulau Sumatera terdapat sebuah pelabuhan penyeberangan Bakauheni, yang merupakan tempat transito penduduk dari Pulau Jawa ke Sumatera dan sebaliknya. Dengan demikian Pelabuhan Bakauheni merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera bagian selatan.

Jarak antara Pelabuhan Bakauheni (Lampung Selatan) dengan Pelabuhan Merak (Propinsi Banten) kurang lebih berjarak 30 kilometer, dengan waktu tempuh kapal penyeberangan sekitar 1,5 sampai 2 jam. Kabupaten Lampung Selatan mempunyai daerah daratan ± 2.109,74 km² (LSDA 2007), dengan kantor pusat pemerintahan di Kota Kalianda. Saat ini Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah penduduk 923.002 jiwa (LSDA 2007), memiliki luas daratan ± 2.109,74 km2 yang terbagi dalam 17 kecamatan dan terdiri dari 248 desa dan 3 kelurahan.

Peta Kabupaten Lampung Selatan

Gambar 1. Peta Lampung Selatan sebelum dipecah menjadi Pesawaran

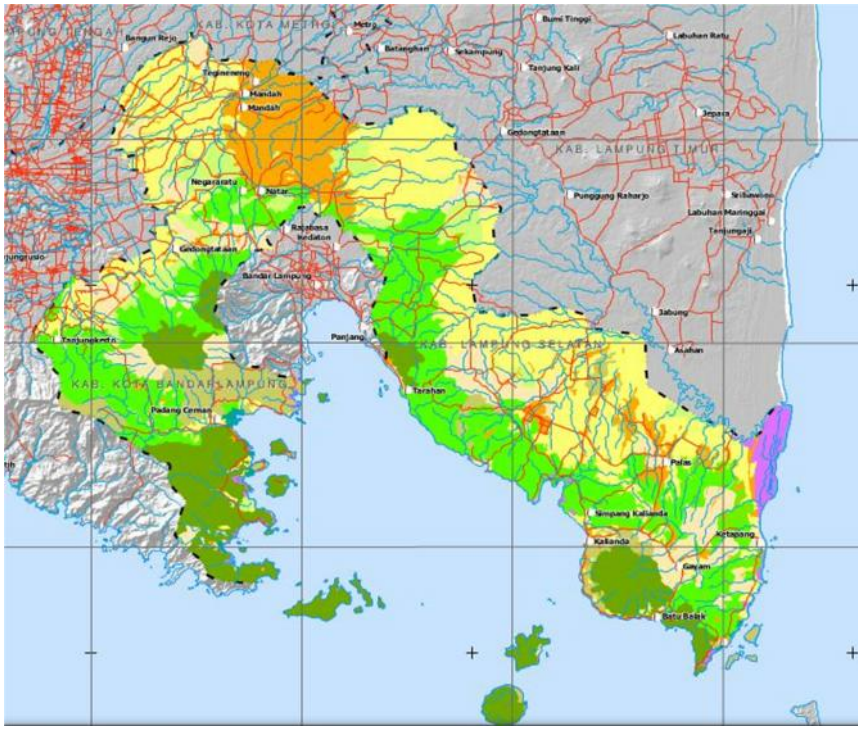

Surat Perintah Tugas tanggal 17 Mei 1980 nomor 259/V/BKT/1980 Tim Departemen Dalam Negeri melakukan Penelitian Lapangan dari tanggal 19 sampai dengan 29 Mei 1980 terhadap 6 (enam) kota kecamatan sebagai alternatif calon ibu kota baru Lampung Selatan, yaitu Kota Agung, Talang Padang, Pringsewu, Katibung, Kalianda dan Gedung Tataan.

Gambar 2. Peta Lampung Selatan setelah dipecah menjadi Pesawaran

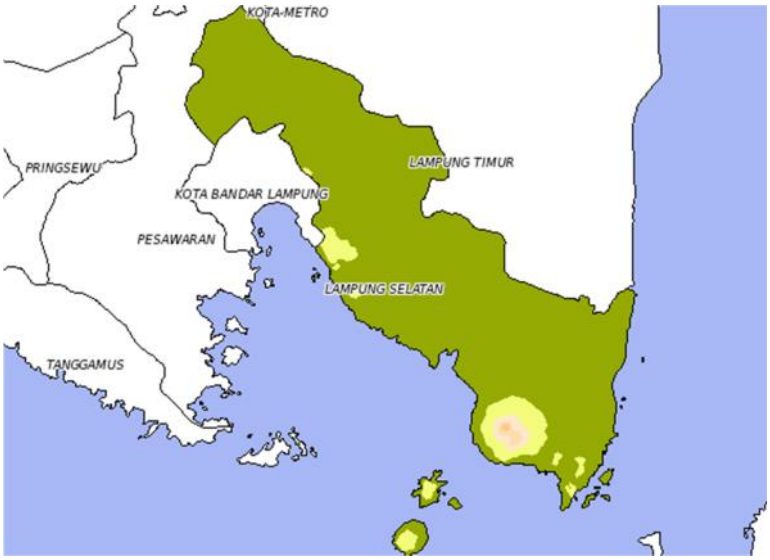

4.1.1. Terbentuknya Kabupaten Dati II Lampung Selatan

Sejarah terbentuknya Kabupaten Lampung Selatan erat kaitannya dengan UUD1945. Di dalam UUD 1945 bab VI Pasal 18 menyebutkan bahwa

"Pembagian Daerah di Indonesia atas Daerah Besar dan Kecil, dengan bentuk susunan Pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan Hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa"

Sebagai realisasi dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dimaksud, lahirlah Undang-Undang nomor 1 tahun 1945 yang mengatur tentang kedudukan Komite Nasional Daerah yang pertama, antara lain mengembalikan kekuasaan pemerintah di daerah kepada aparatur yang berwenang yaitu Pamong Praja dan Polisi. Selain itu juga untuk menegakkan pemerintah di daerah yang rasional dengan mengikutsertakan wakil-wakil rakyat atas dasar kedaulatan rakyat. Selanjutnya disusul dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa Pembentukan Daerah Otonom dalam Wilayah Republik Indonesia.

Daerah Otonom dalam Wilayah Republik Indonesia yang susunan tingkatannya adalah sebagai berikut:

- Propinsi daerah Tingkat I
- Kabupaten/Kota madya(Kota Besar), Daerah TK II
- Desa (Kota Kecil) Daerah TK III

Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1948 dimaksud, maka lahirlah Provinsi Sumatera Selatan dengan Perpu Nomor 33 tanggal 14 Agustus 1950 yang dituangkan dalam Perda Sumatera Selatan nomor 6 tahun 1950. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah untuk Daerah Propinsi, Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil, maka keluarlah Peraturan Propinsi Sumatera Selatan nomor 6 tahun 1950 tentang pembentukan DPRD Kabupaten di seluruh Propinsi Sumatera Selatan.

Perkembangan selanjutnya, guna lebih terarahnya pemberian Otonomi kepada Daerah bawahannya yaitu diatur selanjutnya dengan Undang-Undang Darurat nomor 4 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Dearah Propinsi Sumatera selatan sebanyak 14 Kabupaten, di antaranya Kabupaten Dati II Lampung Selatan beserta DPRD dan 7 (tujuh) dinas otonom yang ditetapkan tanggal 14 Nopember 1956. dengan ibu kota di Tanjung Karang-Teluk Betung atau yang sekarang dikenal dengan kota Bandar Lampung.

Selanjutnya dalam perjalanan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, Kabupaten Lampung Selatan secara resmi menjadi Daerah otonom pada tanggal 14 Nopember 1954, akan tetapi pimpinan daerah telah ada dan dikenal sejak tahun 1946.

Sebelum menjadi daerah otonom, wilayah lampung selatan sejak awal kemerdekaan, terdiri dari 4 (empat) kewedanan masing-masing:

- Kewedanan Kota Agung, meliputi kecamatan Wonosobo, Kota Agung dan Cukuh Balak. (sekarang menjadi wilayah Kabupaten Tanggamus)
- Kewedanan Pringsewu, meliputi Kecamatan Pagelaran, Pringsewu, Gadingrejo, Gedong tataan dan Kedondong. (sebagian menjadi wilayah Kabupaten Pringsewu dan (Kabupaten Pesawaran)
- Kewedanan Teluk Betung, meliputi Kecamatan Natar, Teluk Betung dan Padang Cermin. (sekarang sebagian menjadi wilayah (Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung)
- Kewedanan Kalianda, meliputi Kecamatan Kalianda dan Penengahan.

Pada tahun 1959, dibentuk Sistem Pemerintahan Negeri yang merupakan penyatuan dari beberapa negeri yang ada pada saat itu, yaitu:

- Negeri Cukuk Balak, meliputi Kecamatan Cukuk balak, Tahun 1990 Kecamatan Cukuk Balak di bagi dua kecamatan yaitu Kecamatan Cukuk Balak dan Negeri Kelumbayan.
- Negeri Way Lima, meliputi Kecamatan Kedondong. Tahun 1970 Kecamatan Kedondong dibagi dua yaitu Kecamatan Kedondong dan Pardasuka, kemudian tahun 1990 Kecamatan Kedondong di bagi dua yaitu Kecamatan Kedondong dan Way Lima.
- Negeri Gedong Tataan, meliputi Kecamatan Gedong Tataan. Pada tahun 1990 Kecamatan Gedong Tataan dibagi 2 yaitu Kecamatan Gedong Tataan dan Negeri Katon.
- Negeri Gadingrejo, meliputi Kecamatan Gadingrejo.
- Negeri Pringsewu, meliputi Kecamatan Pringsewu, tahun 1970 kecamatan ini di bagi dua yaitu Kecamatan Pringsewu dan Sukoharjo. Tahun 1990 Kecamatan Sukoharjo dibagi dua yaitu Kecamatan Sukoharjo dan Adi Luwih.
- Negeri Pugung, meliputi Kecamatan Pagelaran.
- Negeri Talang Padang, meliputi Kecamatan Talang Padang. Pada tahun 1970 Kecamatan ini dibagi dua yakni Kecamatan Talang Padang dan Pulau Panggung.
- Negeri Kota Agung, meliputi Kecamatan Kota Agung. Tahun 1990 Kecamatan Kota Agung dibagi dua yakni Kecamatan Kota Agung dan Pematang Sawah.
- Negeri Semangka, meliputi Kecamatan Wonosobo. Tahun 1990 Kecamatan Wonosobo di bagi dua yaitu Kecamatan Wonosobo dan Way Semangka.

- Negeri Buku, meliputi Kecamatan Natar. Tahun 2000 Kecamatan ini dibagi dua yaitu Natar dan Tegineneng.
- Negeri Balau termasuk Kecamatan Natar pada tahun 1968 Kecamatan Kedaton dipindahkan dari Kecamatan Natar yang meliputi Negeri Balau. Negeri Kalianda meliputi Kecamatan Kalianda.
- Negeri Kalianda meliputi Kalianda, Katibung dan Sidomulyo. Kemudian tahun 1990 Kecamatan Kalianda di bagi dua yaitu Kecamatan Kalianda dan Rajabasa. Kecamatan Sidomulyo dibagi dua yakni Kecamatan Sidomulyo dan Candipuro, sedangkan Kecamatan Katibung di bagi dua yaitu Katibung dan Merbau Mataram. Selanjutnya pada tahun 2006 Kecamatan Sidomulyo dibagi dua Kecamatan Sidomulyo dan Way Panji dan Kecamatan Katibung di bagi dua yaitu Katibung dan Way Sulan.
- Negeri Dataran Ratu meliputi Kecamatan Penengahan dan Palas. Tahun 1990 Kecamatan penengahan dibagi dua Kecamatan yakni penengahan dan Ketapang. Kecamatan Palas dibagi dua Kecamatan Palas dan Sragi. Kemudian tahun 2006 Kecamatan Penengahan di bagi dua yakni Penengahan dan Bakauheni.
- Negeri Teluk Betung meliputi Kecamatan Teluk Betung dan Kecamatan Panjang. (sekarang masuk Kota Bandar Lampung)
- Negeri Padang Cermin meliputi Kecamatan Padang Cermin. Tahun 1990 kecamatan ini dibagi dua yaitu Kecamatan Padang Cermin dan Punduh Pidada.

Pada tahun 1963 wilayah kewedanan berikut jabatan wedana dihapus selanjutnya diganti menjadi jabatan kepala negeri yang masa jabatannya lima tahun, pada tahun 1970 tidak dipilih lagi dan tugasnya diangkat oleh camat. Pada tahun 1972 semua negeri seluruh Lampung di hapus.

4.1.2. Pemindahan Ibu Kota

Pada Awalnya terbentuk, Lampung Selatan masih merupakan bagian dari Wilayah Sumatera Selatan. Berdasarkan UU no 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah TK I Lampung, maka Daerah TK II Lampung Selatan secara resmi merupakan salah satu Kabupaten dalam daerah TK I Lampung.

Dengan ditingkatkannya status kota Tanjung Karang-Teluk Betung menjadi Kotapraja berdasarkan UU nomor 28 tahun 1959, praktis kedudukan ibukota Kabupaten Dati II Lampung Selatan berada di luar Wilayah Administrasinya. Usaha-usaha untuk memindahkan Ibu Kota Kabupaten Daerah TK II Lampung Selatan dari Wilayah Kota Madya Daerah TK II Tanjung Karang-Teluk Betung ke Wilayah Administrasi Kabupaten Daerah TK II Lampung Selatan telah dimulai sejak tahun 1968.

Atas dasar Surat Edaran Mendagri tanggal 15 Mei 1973 nomor Pemda 18/2/6 yang antara lain mengharapkan paling lambat tahun pertama Repelita III setiap Ibu Kota Kabupaten/Kotamadya harus telah mempunyai rencana induk (master plan), maka telah diadakan Naskah Kerjasama antara Pemda TK I Lampung dan Lembaga Penelitian dan Planologi Departemen Planologi Institut Teknologi Bandung (LPP-ITB) nomor OP.100/791/Bappeda/1978 dan nomor: LPP.022/NKS/Lam/1978 tanggal 24 Mei 1978.

Dari hasil penelitian terhadap 20 (dua puluh) ibu kota kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Daerah TK II Lampung Selatan, maka terpilih 2 (dua) kota yang mempunyai nilai tertinggi untuk di jadikan calon ibu kota, yaitu Pringsewu dan Kalianda.

Dengan Surat Perintah Tugas tanggal 17 Mei 1980 nomor 259/V/BKT/1980 Tim Departemen Dalam Negeri melakukan Penelitian Lapangan dari tanggal 19 sampai dengan 29 Mei 1980 terhadap 6 (enam) kota kecamatan sebagai alternatif calon ibu kota baru Lampung Selatan, yaitu Kota Agung, Talang Padang, Pringsewu, Katibung, Kalianda dan Gedung Tataan.

Hasil Penelitian Tim Depdagri berkesimpulan bahwa Kalianda adalah pilihan yang tepat sebagai calon ibu kota yang baru Kabupaten Dati II Lampung Selatan. Dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Juli 1980 nomor 135/3009/PUOD, ditetapkan lokasi calon ibu kota Kabupaten Dati II Lampung Selatan di Desa Kalianda, Desa Bumi Agung dan Desa Way Urang.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah no 39 tahun 1981 tanggal 3 Nopember 1981, ditetapkan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah TK II Lampung Selatan dari Wilayah Kota Madya Tanjung Karang-Teluk Betung ke Kota Kalianda yang terdiri dari Kelurahan Kalianda, Kelurahan way Urang dan Kelurahan Bumi Agung.

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 135/102/PUOD tanggal 2 Januari 1982, peresmiannya dilakukan pada tanggal 11 Pebruari 1982 oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Bapak Amir Machmud. Sedangkan kegiatan Pusat Pemerintahan di Kalianda ditetapkan mulai tanggal 10 Mei 1982.

4.1.3. Sosial Budaya dan Agama

Berdasarkan data yang ada penduduk Kabupaten Lampung Selatan secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu penduduk asli Lampung dan penduduk pendatang. Penduduk asli khususnya sub suku Lampung Peminggir umumnya berkediaman di sepanjang pesisir pantai. Penduduk sub suku lainnya tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Penduduk pendatang yang berdomisili di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari bermacam-macam suku.

Suku yang terdapat di Lampung Selatan ini seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Dari semua suku pendatang tersebut jumlah terbesar adalah pendatang dari Pulau Jawa. Besarnya penduduk yang berasal dari Pulau Jawa dimungkinkan oleh adanya kolonisasi pada zaman penjajahan Belanda dan dilanjutkan dengan transmigrasi pada masa setelah kemerdekaan, disamping perpindahan penduduk secara swakarsa dan spontan. Beragamnya etnis penduduk di Kabupaten Lampung Selatan mungkin juga disebabkan karena KabupatenLampung Selatan sebagian besar adalah wilayah pantai sehingga banyak nelayan yang bersandar dan menetap.

Para nelayan ini pada umumnya mendiami wilayah pantai timur dan selatan, yang sebagian besar berasal dari pesisir selatan Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan. Dengan beragamnya etnis penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, maka beragam pula adat dan kebiasaan masyarakatnya sesuai dengan asal daerahnya. Adat kebiasaan penduduk asli yang saat ini masih sering terlihat adalah pada acara-acara pernikahan. Penduduk Kabupaten Lampung Selatan dalam bentuknya yang asli memiliki struktur hukum adat tersendiri. Hukum adat tersebut berbeda antara yang satu dengan lainnya. Secara umum penduduk asli Lampung yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu masyarakat Lampung Peminggir yang merupakan mayoritas suku Lampung di Kabupaten Lampung Selatan dan kelompok kedua yaitu masyarakat Lampung Pepadun. (sumber : LSDA-2007)

4.1.4. Daftar Kecamatan

Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari beberapa kecamatan, diantaranya:

Tabel 4.1. Daftar Nama Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Nama Desa
1	Bakauheni	Bakauheni, Hatta, Kelawi, Semanak, Totoharjo.
2	Candipuro	Candirejo, Beringin Kencana, Batuliman, Banyumas, Sidoluhur, Bumijaya
3	Jati Agung	Marga Agung; Banjar Agung; Fajar Baru; Gedung Agung; Gedung Harapan; Jati Mulyo; Karang Anyar; Margo Dadi; Margo Kaya; Margo Lestari; Margo Mulyo; Purwotani; Rejo Mulyo; Sidodadi Asri; Sinar Rejeki; Sidoharjo; Sumber Jaya; Way Hui.
4	Kalianda	Kesugihan, Pematang, Kecapi, Sukaratu, Negeri Pandan, Palembapang, Babulang, Buah Bekhak, Maja, Pauh Tanjung Iman, Tengkujuh, Jondong, Sumur Kumbang, Gunung Terang, Merak Belantung, Bulok, Agom, Sukatani, Taman Agung, Marga Catur, Tajimalela, Canggu, Kedaton, Munjuk Sampurna, Kelurahan Way Handak, Kelurahan Way Ukhang, Kelurahan Bumi Agung.
5	Katibung	Babatan, Karya Tunggal, Neglasari, Pardasuka, Sidomekar, Sukajaya, Rangai Tri Tunggal, Tanjung Agung, Tanjungan, Tanjung Ratu, Tarahan, Trans Tanjungan.
6	Merbau Mataram	Suban, umbulmerbau, tanjungbaru, baruranji, karang raja
7	Natar	Bandarejo, Banjarnegeri, Branti Raya, Bumisari, Candimas, Haduyang, Hajimena, Krawangsari, Mandah, Merak Batin, Muara Putih, Natar, Negara Ratu, Pancasila, Pemanggilan, Purwosari, Rejosari, Rulung Helok, Rulung Raya, Sidosari, Sukadamai, Tanjung Sari.
8	Tegineneng	Tri Mulyo; Kejadian; Batang Hari Ogan; Negara Ratu Wates; Gunung Sugih Baru; Gedung Gumanti; Kresno Widodo; Sinar Jati; Margo Rejo; Gerning; Panca Bakti; Margo Mulyo; Rejo Agung; Kota Agung; Bumi Agung.

No	Nama Kecamatan	Nama Desa
9	Palas	Sukaraya, Bangunan, Rejo Mulyo, Bali Agung, Bumi Daya, Palas Pasemah, Palas Jaya, Pulau Tengah, Palas.
10	Penengahan	Banjarmasin, Belambangan, Gandri, Gayam, Gedung Harta, Kampung Baru, Kekiling, Kelaten, Kelau, Kuripan, Padan, Pasuruan, Penengahan, Pisang, Rawi, Ruang Tengah, Sukabaru, Sukajaya, Taman Baru, Tanjung Heran, Tetaan, Way Kalam.
11	Rajabasa	Simpur, cugung, cukuh, kerinjing,
12	Sidomulyo	Sidowaluyo, Kotadalam, Siringjana, Bendungan, Campingtiga, Talang Baru, Krajan, Sidosari, Tran Tanjungan
13	Sragi	Tamansari, Mandalasari, Pematangpasir, Sumberagung, Sukaradeg, Bandaragung.
14	Tanjung Bintang	Budi Lestari, Galih Lunik, Jati Baru, Jati Indah, Kali Asin, Lematang, Purwodadi Simpang, Rejomulyo, Sabah Balau, Serdang, Sinar Ogan, Sindang Sari, Srikaton, Sukanegara, Trimulyo, Way Galih
15	Tanjungan	babatan, tanjung ratu, pardasuka, rwjo agung, sukanegara
16	Way Panji	Balinuraga, Sidoharjo, Sidomakmur, Sidoreno.
17	Way Sulan	Karangpucung, Way Ketibung, Talang waysulan
18	Negri Katon	Negeri Katon; Purworejo; Pujo Rahayu; Kalirejo; Kagungan Ratu; Tanjung Rejo; Roworejo; Lumbirejo; Sidomulyo; Ponco Kresno; Sinar Bandung; Bangun Sari; Tri Rahayu; Tresno Maju; Halangan Ratu; Pejambon; Negara Saka.

Sumber : PP NO 46 1999 dan provil daerah Lampung Selatan tahun 2000

4.1.5. Lambang

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Bentuk, Warna, dan Isi Lambang Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Dengan ini diberitahukan kepada masyarakat Provinsi Lampung.

Kabupaten Lampung Selatan terhitung sejak Tanggal 8 November 2011, Bentuk, Warna, dan Isi Lambang Daerah Kabupaten Lampung Selatan mengalami perubahan :

Gambar 3. Lambang daerah Lampung Selatan

(Logo Lama)

(Logo Baru)

Logo baru yang memiliki makna Warna Lambang Daerah terdiri dari biru muda, kuning emas, biru tua, merah, putih, hijau, coklat dan hitam, yang masing-masing warna melambangkan:

1. biru muda melambangkan perubahan, kejujuran, kemakmuran, ketaatan dan takwa;
2. kuning emas melambangkan keagungan dan kejayaan serta kebesaran cita dan masyarakat untuk membangun daerah dan negaranya;
3. biru tua melambangkan laut, kesetiaan, ketekunan dan ketabahan juga melambangkan kekayaan sungai dan lautan yang merupakan sumber perikanan dan kehidupan para nelayan;
4. merah melambangkan keberanian dan kedinamisan;
5. putih melambangkan kesucian;
6. hijau melambangkan kesejahteraan dan kecerdasaan; dan
7. coklat melambangkan tanah yang subur untuk ladang dan sawah.

Isi Lambang Daerah mempunyai makna terdiri atas:

1. kata Lampung Selatan berarti Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
2. pita bewarna merah melambangkan keberanian;
3. bintang emas bersegi 5 (lima) melambangkan nilai-nilai keagamaan;
4. siger melambangkan mahkota keagungan adat budaya dan tingkat kehidupan terhormat;

5. bergerigi 7 (tujuh) melambangkan 7 (tujuh) marga antara lain (marga Pesisir/Rajabasa, Marga Legun, Marga Katibung, Marga Dantaran, Marga Ratu, Marga Sekampung Ilir, dan Marga Sekampung Udik);
6. setangkai Padi berjumlah 14 (empat belas) bulir, Kapas berjumlah 11 (sebelas) tangkai, Mutiara pada Siger berjumlah 56 (lima puluh enam) butir, merujuk pada hari jadi Kabupaten Lampung Selatan 14 November 1956;
7. gunung, laut, daratan, dan pohon kelapa melambangkan kekayaan alam;
8. aksara Lampung yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat;
9. sebuah badik melambangkan keperwiraan

4.2. Desa Bali Nuraga

4.2.1. Sejarah Desa

Pada jaman dahulu Desa Balinuraga adalah lahan milik pemerintah yang kemudian dijadikan sebagai daerah tujuan Transmigrasi pada tahun 1963 dan pada tahun itu juga diberi nama Desa Balinuraga di bawah wilayah Kecamatan Kalianda.

Pada tanggal 27 September 1967 Dinas Transmigrasi menempatkan 4 (empat) roambongan peserta Transmigrasi yang ditempatkan di Balinuraga. Rombongan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sidorahayu diketuai oleh Pan Sudiartana yang berjumlah 250 KK
2) Sukanadi diketuai oleh Pan Kedas yang berjumlah 75 KK
3) Pandearge diketuai oleh Made Gedah yang berjumlah 175 KK
4) Rengas diketuai oleh Oyok yang berjumlah 40 KK

Dan tahun 1963-1965 wilayah ini belum mempunyai struktur Pemerintah Desa. Segala administrasi masih ditangani oleh Jawatan transmigrasi.

Mangku Siman, untuk mengordinir rombongan-rombongan trasnmigrasi Mangku Siman sebagai ketua rombongan seluruhnya. Pada tahun 1965 barulah perangkat Desa Balinuraga mulai dirintis dan terpilihlah Pemerintahan Sementara, yaitu:

Kepala Desa : Aji Regeg

Kamitua : Sudiartana

Bayan : 1. Sudiartana

2. Pan Kedas

3. Made Gedah

4. Oyok

Dan pada pertengahan tahun 1973 diadakan pemilihan Kepala Desa, pada pemilihan tersebut terpilih Wayan Getem sebagai Kepala Desa satu priode dari 1973 sampai 1981. Dan setelah itu diadakan pemilihan lagi yang dimenangkan oleh Nyoman Harun selama 2 (dua) priode. Pada akhir tahun 1998 dilaksanakan kembali pemilihan kepala desa dan terpilih Made Kelas yang menjabat selama 6 (enam) n\bulan dan dilanjutkan oleh Wayan Ruwah sebagai PJS sampai dengan tahun 2006. Pada tahun 2006 Wayan Rawuh mengikuti seleksi bakal calon kepala desa, maka PJS Kepala Desa Balinuraga dipegang oleh Komang Widiana sampai dengan April 2007.

Pada tanggal 27 Juli 2007 wilayah Desa Balinuraga dari wilayah kecamatan Sidomulyo menjadi daerah pemekaran baru yakni Kecamatan Way Panji. Pada tahun 2007 diadakan pemilihan kepala desa kembali dan terpilih Ketut Wardana sebagai kepala desa untuk masa bakti 2007-2013.

Tabel 4.2. Nama kepala desan dan masa bakti

No	Nama Kepala Desa	Masa Bakti Memerintah
1	Mangku SIman	1963-1965
2	Aji Regeg	1965-1973
3	Wayan Getem	1973-1981
4	Nyoman Harun	1981-1998
5	Made Kelas	1998-1998
6	Wayan Ruwah	1998-2006
7	Komang Widana	2006-2007
8	Ketut Wardana	2007-2013

Sumber : RPJM Des Balinuraga 2010

4.2.2. Visi dan misi

Visi

"Kebersamaan Dalam Membangun Demi Desa Balinuraga Yang Lebih Maju"

Rumusan visi ini tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerinntahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Balinuraga baik secara individu maupun kelembagaan, sehingga Desa Balinuraaga mengalami suatu kemajuan dan perubahan yang lebih baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelengaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Misi

- Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada.
- Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipasif.
- Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan desa Balinuraga yang aman, tentram dan damai.

- Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Memproduktifkan lembaga-lembaga yang berkompeten dibidang pertanian.
- Membangun sarana-sarana infrastruktur untuk peningkatan hasil pertanian.
- Pembinaan dan pelatihan-pelatihan kepada pelaku-pelaku pertanian.
- Mencari terobosan baru guna memperoleh hasil yang lebih baik dibidang pertanian.

4.2.3. Demografi

1. Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Balinuraga, terletak diantara:
Sebelah Utara : Desa Trimomukti Kec Candipuro
Sebelah Selatan : Desa Sidoreno Kec Way Panji
Sebelah Barat : Desa Way Gelam Kec Candipuro
Sebelah Timur : Desa Tanjung Jaya Kec Palas

2. Peta Desa Balinuraga

Gambar 4. Peta Desa Balinuraga

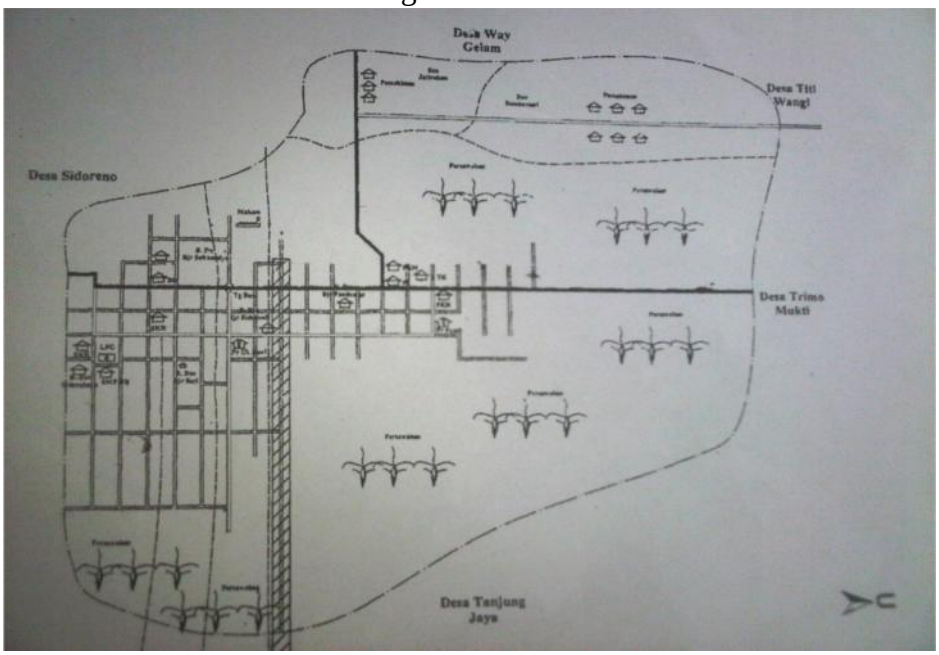

3. Luas Wilayah Desa

Tabel 4.3. Peruntuka lahan desa Balinuraga

No	Jenis Lahan	Luas
1	Pemukiman	102 ha
2	Sawah	477 ha
3	Ladang	308 ha
4	Perkantoran	¼ ha
5	Sekolahan	2 ha
6	Lapangan	1 ha
7	Jalan poros	4 Km
8	Jalan desa	15 Km

Sumber : RPJM Des Balinuraga 2010

4. Jumlah Penduduk

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Balinuraga

No	Jumlah Penduduk	Jumlah
1	Kepala Keluarga	750 KK
2	Laki-laki	1164 Orang
3	Perempuan	1746 Orang

Sumber : RPJM Des Balinuraga 2010

5. Pendidikan

Tabel 4.5. Tingkat pendidikan warga Balinuraga

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1	SD/MI	1000
2	SLTP/MTs	500
3	SLTA/MA	500
4	S1/Diploma	53
5	Putus Sekolah	100
6	Buta Huruf	59
7	Belum Sekolah	476

Sumber : RPJM Des Balinuraga 2010

6. Lembaga Pendidikan

TK/PAUD : 3 Buah (lokasi di Dusun I, V, VII)
SD/MI : 3 Buah (lokasi di Dusun I, III, V)
SLTP/MTS : 1 Buah (lokasi di Dusun I)
TPA/TPQ : 1 Buah (lokasi di Dusun VII)

7. Keagamaan

Tabel 4.6. Daftar pemeluk agama desa Balinuraga

No	Agama	Jumlah Penganut (orang)
1	Islam	535
2	Kristen	-
3	Katolok	-
4	Hindu	2375
5	Buda	-

Sumber : RPJM Des Balinuraga 2010

Tabel 4.7. Data bangunan tempat ibadah desa Balinuraga

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Gereja	-
3	Pura	18
4	Vihara	-
5	Masjid	-

Sumber : RPJM Des Balinuraga 2010

8. Keadaan Ekonomi

Tabel 4.8. Luas pemanfaatan lahan pertanian

No	Lahan	Luas (ha)
1	Sawah/Padi	477
2	Jagung	115
3	Kakau	2
4	Sawit	15
5	Karet	400
6	Kelapa	6

Sumber : RPJM Des Balinuraga 2010

Tabel 4.9. Jumlah peliharaan ternak

No	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)
1	Kambing	203
2	Sapi	812
3	Kerbau	12
4	Ayam	10203
5	Itik	50
6	Babi	1300

Sumber : RPJM Des Balinuraga 2010

Tabel 4.10. Struktur mata pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Petani	1200
2	Pedagang	200
3	PNS	54
4	Tukang	25
5	Guru	40
6	Buruh	40
7	Swasta	66
8	Belum bekerja	984

Sumber : RPJM Des Balinuraga 2010

9. Kondisi Pemerintahan Desa

Susunan Organisasi pemerintahan desa Balinuraga:

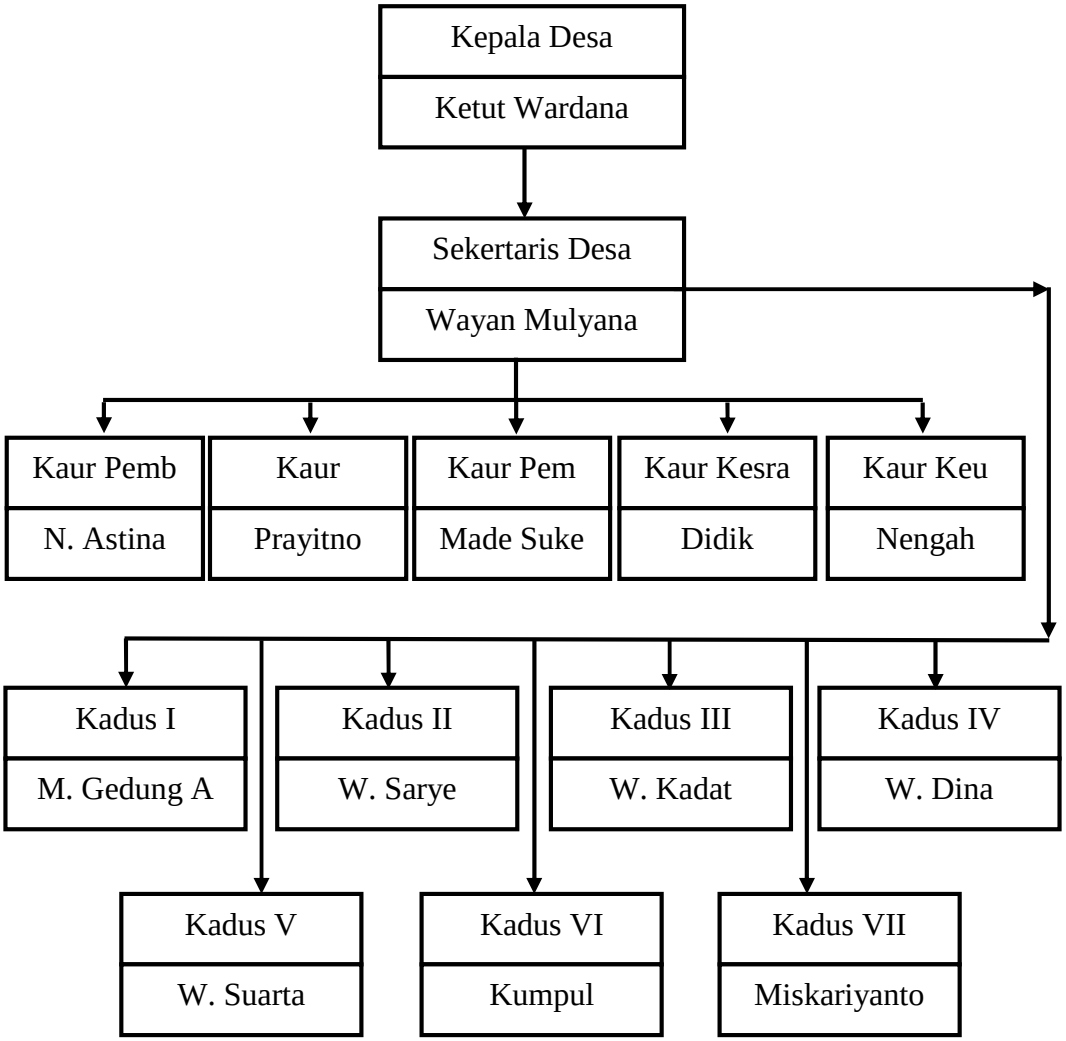

Susunan kepengurusan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) desa Balinuraga kecamatan Way Panji kabupaten Lampung Selatan:

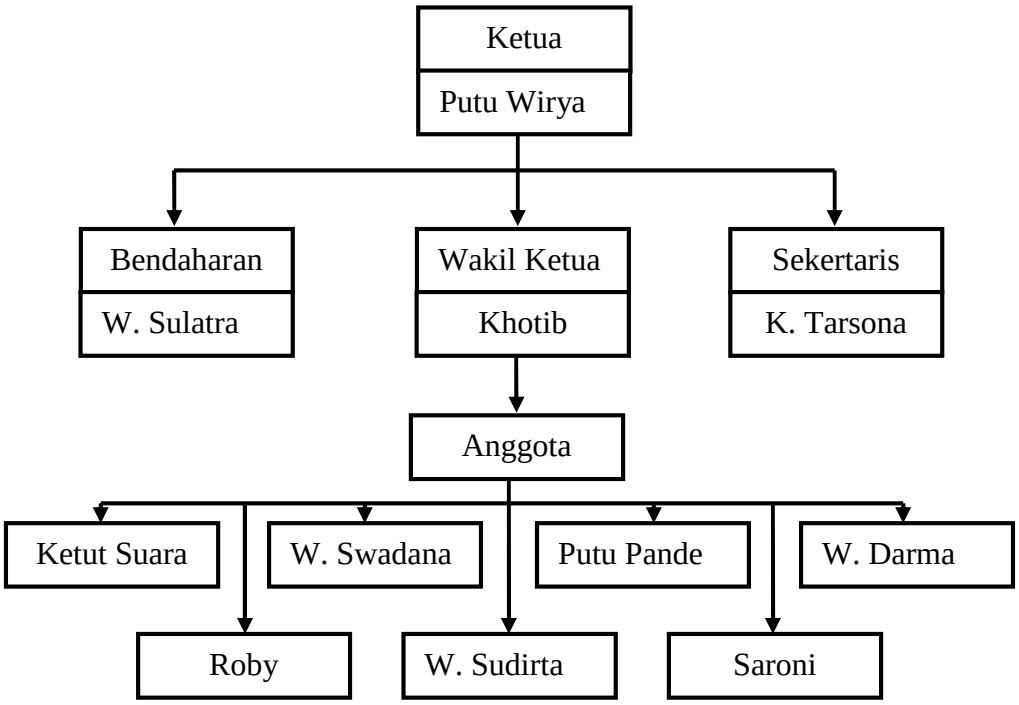

4.2.4. Potensi dan Masalah

Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana, lingkungan, kesehatan, pendidikan, sosial-budaya, keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di desa.

Potensi

1. **Sumber Daya Alam**

   Potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Desa Balinuraga adalah lahan kosong, sungai, rawa, sawah, yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

2. **Sumber Daya Manusia**

   Potensi Sumber Daya Manusia yang ada di Balinuraga adalah: tenaga kerja, kader kesehatan, kader pertanian dan tersedianya SDM yang memadai, hal ini bisa dilihat dari table tingkat pendidikan warga.

3. **Sumber Daya Sosial**

   Potensi dalam bidang sosial yang dimiliki di desa Balinuraga ini adalah banyaknya lembaga-lolembaga yang ada di masyarakat seperti LPM, Gapoktan, Kelompok Pengajian, Arisan, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu, Karang Taruna dan Risma.

4. **Sumber Daya Ekonomi**

   Dalam bidan ekonomi, sumber daya yang dimiliki dan dapat dikembangkan di desa Balinuraga ini adalah adany lahan-lahan pertanian yang luas, peerkebunan, toga, penggilingan padi, penggilingan kopi, peternakan, alat-alat produksi pertanian dan lain-lain.

Masalah

1. **Sarana Prasarana**

   Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan pemeliharaan bangunan milik umum, Lokasi pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial, Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasarkan keinginan, Masih terbatasnya dana pembangunan desa yang dikelola.

2. Ekonomi

Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi desa, Belum adanya pemasukan dana dari penggunaan gedung serba guna secara maksimal, Adanya kemacetan dalam simpan pinjam khususnya dana PNPM MP, Terbatasnya dana untuk modal, Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat, Pemanfaatan rentenir oleh sebagian masyarakat.

3. Sosial Budaya

Pembangunan Non Fisik/Moral yang masih terabaikan, Belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa.

4. Pemerintahan

Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan pemerintahan, Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsinya, Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik, Sistem pemerintahan ditingkat yang paling bawah (RT) belum dapat berjalan optimal, Buku administrasi yang belum dimanfaatkan secara optimal.

5. Kesehatan

Belum adanya tempat pelayanan kesehatan (PKD) yang memadai, Pemanfaatan Posyandu yang belum optimal, Kegiatan kader posyandu yang masih tergantung pada petugas kesehatan, Terbatasnya air bersih dan penggunaan air dari selokan masih besar, Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat.

6. Kelembagaan

Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa, Tingkat pertemuan dan rapat kordinasi yang masih kurang, Belum tersusunya rencana kegiatan dan program kerja. Bidang-bidang masih banyak yang belum berjalan optimal, Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang, Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa.

7. Kamtibmas

Kegiatan masyarakat dan siskamling belum optimal, Permasalahan/perselisihan antar pribadi masih sering muncul, Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menaati aturan, Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan.

8. Lingkungan Hidup

Belum adanya peraturan tentang penanggulangan penyakit masyarakat, Kegiatan masyarakat dan siskamling belum optimal. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan leingkungan, Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai, Masih belum teratasinya penyaluran air hujan disebagian dusun, Pemanfaatan air bersih oleh masyarakat belum optimal, Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang.

9. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam bidang pertemuan masih kurang, Kegiatan gotong royong yang masih pilih-pilih, Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial.

10. Pertanian

Saluran irigasi yang belum tertata dengan baik, Perkumpulan petani belum berjalan dengan baik, Masih dijumpai perselisihan antar petani mengenai air terutama pada musim kemarau.

11. Hukum

Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada, Penegakan hukum yang masih kurang, Alergi terhadap aparat penegak hukum.

12. Home Industri

Belum adanya pengembangan hom industry, Kesulitan dalam pendapatan dan penambahan modal.

13. Pertanahan

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat sertifikat hak milik, Pemasangan tanda batas yang kurang jelas, Mutasi tanah yang masih kurang

4.3. Desa Agom

4.3.1. Sejarah Desa

Desa dahulunya merupakan desa tanpa penduduk, karena yang terdapat di desa Agom ini adalah lahan pertanian warga yang jauh dari desa ini. Karena alasan jarak tempuh yang jauh para pemilik lahan mendirikan gubuk yang lama kelamaan mejadi rumah tetap dan semakin banyak yang tinggal di desa Agom. Kemudian desa Agom kecamatan Kalianda baru dibentuk secara resmi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 2002 Tanggal 21 Mei 2002.

4.3.2 Demografi

1. Luas Wilayah

Luas wilayah keseluruhan desa Agom adalah 630 ha, Pemanfaatan lahan untuk:

Tabel 4.11. Pemanfaatan lahan dan Luas lahan desa Agom

No	Fungsi Lahan	Luas
1	Sawah dan Ladang	375
2	Bangunan Umum	4
3	Pemukiman warga	124
4	Pemakan umum	2

Sumber : Profil Desa Agom 2011

2. Kondisi Geografis

Curah Hujan : 600-800 mm/th

Tofografi : Dataran rendah

Suhu udara rata-rata : 23-24° C

3. Peta Wilayah

Gambar 5. Peta Desa Agom

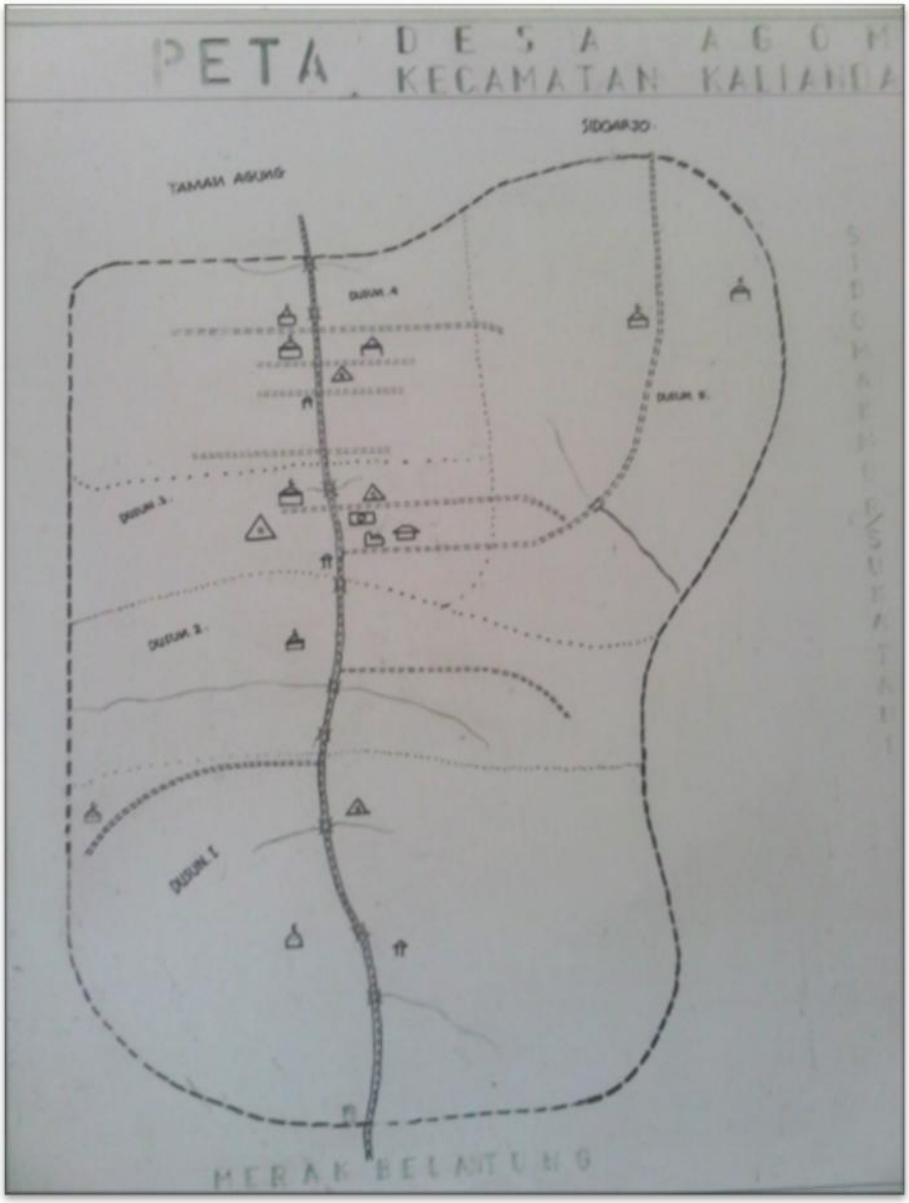

4. Jumlah penduduk

Tabel 4.12. Jumlah Penduduk desa Agom

No	Penduduk	Jumlah
1	Jumlah Kepala keluarga	787 KK
2	Penduduk Laki-laki	1456 Jiwa
3	Penduduk Perempuan	1341 Jiwa
4	Jumlah keseluruhan penduduk	2797 Jiwa

Sumber : Profil Desa Agom 2011

5. Keadaan Sosial

a. Tingkat Pendidikan

Tabel 4.13. Jumlah warga desa Agom berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Taman kanak-kanan	78
2	Sekolah Dasar	1258
3	SLTP	416
4	SLTA	210
5	Akademi (diploma)	12
6	Sarjana	13
7	Pondok pesantren	7
8	SLB	5
9	Kursus	15

Sumber : Profil Desa Agom 2011

b. Bangunan Gedung Pendidikan

Tabel 4.14. Jumlah bangunan gedung pendidikan di desa Agom

No	Gedung	Jumlah (buah)
1	TK	3
2	SD Negri	1
3	MI	2
4	SMP Swasta	2
5	SMA Swasta	1
6	Pondok pesantren	2

Sumber : Profil Desa Agom 2011

c. Keagamaan

Tabel 4.15. Jumlah warga Agom berdasarkan pemeluk agama

No	Agama	Jumlah Penganut Agama
1	Islam	2505
2	Katolik	74
3	Protestan	211
4	Hindu	6
5	Budha	1

Sumber : Profil Desa Agom 2011

d. Data Tempat Ibadah

Tabel 4.16. jumlah bangunan rumah ibadah di desa Agom

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masji	5
2	Mushola	7
3	Gereja	2

Sumber : Profil Desa Agom 2011

6. Keadaan Ekonomi

Tabel 4.17. Jumlah warga Agom berdasarkan pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Karyawan	60
2	PNS	19
3	TNI/Polri	3
4	Swasta	1215
5	Pedagang	45
6	TANI	720
7	Tenaga tukang	30
8	Buruh Tani	115
9	Pensiunan	2
10	Jasa	10

Sumber : Profil Desa Agom 2011

7. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Struktur kepengurusan pemerintahan desa

Gambar 6. Struktur kepengurusan pemerintahan desa Agom
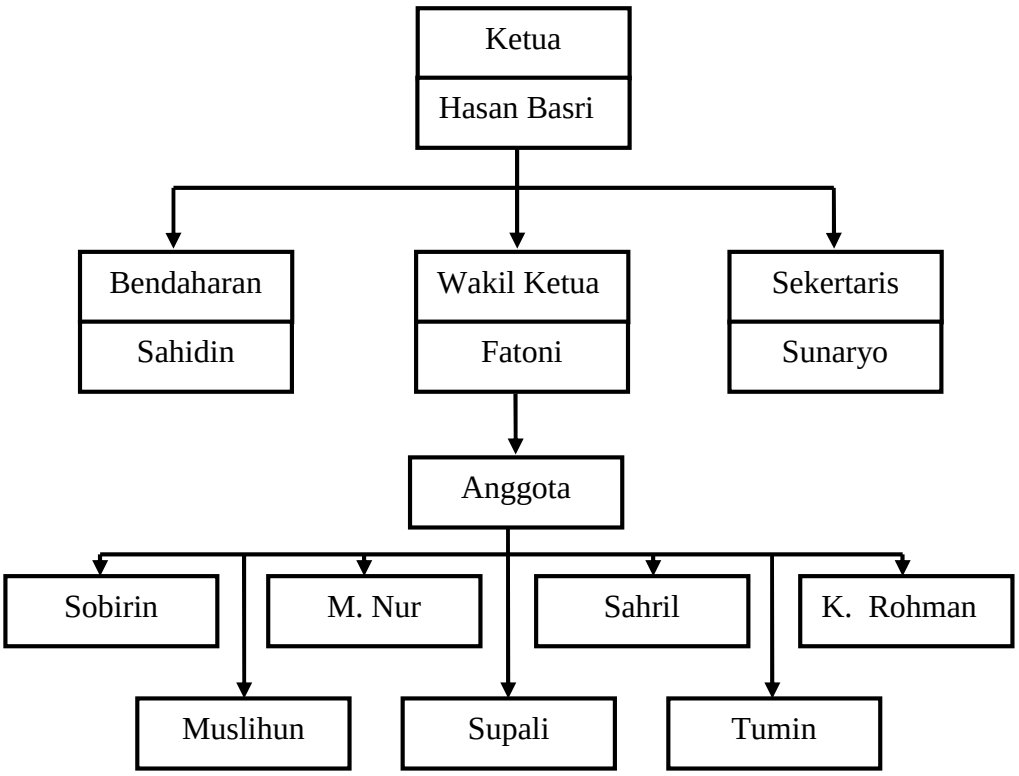
b. Struktur kepengurusan BPD